



ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA DESA, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI LAMPUNG

Cici Mayuza^{1*}, Zulfa Emalia²

^{1,2}Universitas Lampung

Email: cicimayuza09@gmail.com^{1*}, zulfa.emalia@feb.unila.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the effects of village funds, the labor force participation rate, and government expenditure in the education and health sectors on the poverty rate across 13 regencies in Lampung Province. The study uses data from 2015 to 2023. This research employs panel data analysis using the Random Effects Model (REM). The results indicate that village funds, the labor force participation rate, and government expenditure in the education sector have negative and significant effects on poverty. Meanwhile, government expenditure in the health sector does not have a significant effect on poverty.

Keywords: Poverty, Village Funds, Labor Force Participation Rate, Education, Health, Government Expenditure.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa, tingkat partisipasi angkatan kerja, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan, terhadap tingkat kemiskinan pada 13 kabupaten di Provinsi Lampung. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2015-2023. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dengan model Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa, tingkat partisipasi angkatan kerja, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Dana Desa, TPAK, Pendidikan, Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah

PENDAHULUAN

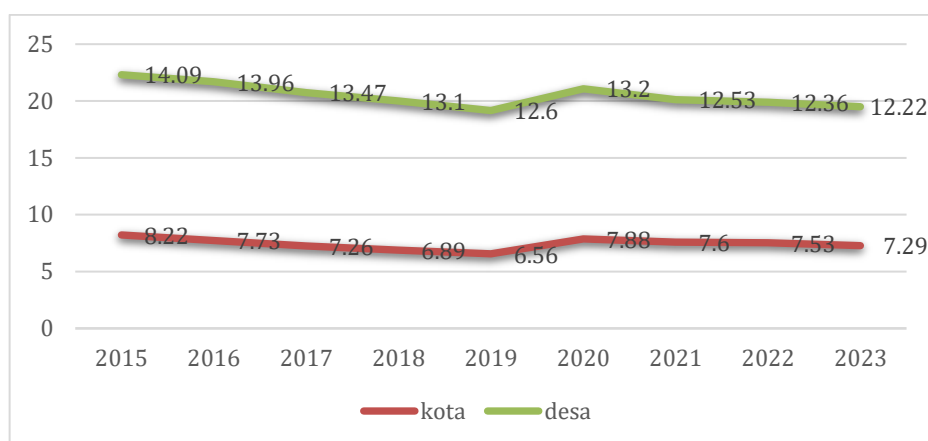
Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan (Ayu & Husaini, 2013). Ketika kemiskinan berkurang maka salah satu tujuan pembangunan nasional telah terwujud sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural atau alami, kultural, atau struktural (Emalia, 2013). Kemiskinan bisa diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya baik dari segi sandang, pangan maupun papan.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang akan selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan sampai saat ini masih sulit untuk dipecahkan, khususnya di negara-negara berkembang. Di Indonesia, kemiskinan menjadi sebuah permasalahan fundamental yang

menjadi pusat perhatian oleh pemerintah. Berbagai kebijakan pembangunan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, namun sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Kemiskinan daerah sebagian besar merupakan hasil agregasi dari kemiskinan pedesaan (Wahyudi & Khotimah, 2022). Seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2, pada lima tahun terakhir persentase penduduk miskin pedesaan lebih besar dari perkotaan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 12,22 persen, sedangkan penduduk miskin perkotaan pada tahun 2023 sebesar 7,29 persen.



Persentase Penduduk Miskin Indonesia Menurut Daerah

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025

Oleh karena itu, untuk mengatasi angka kemiskinan di pedesaan yang masih tinggi, salah satu kebijakan yang telah diambil pemerintah, yang telah berjalan selama sembilan tahun terakhir adalah penyaluran dana desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa menegaskan bahwa salah satu prioritas dana desa adalah untuk penanggulangan kemiskinan dan untuk dapat mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Namun, meskipun dana desa Provinsi Lampung menjadi salah satu yang tertinggi dan angkanya yang relatif meningkat dari tahun ke tahun, Provinsi Lampung juga menjadi salah satu penyumbang angka kemiskinan yang cukup besar.

Menurut Ikhsan, M. & Shidiq (1999), masalah kemiskinan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu modal sumber daya manusia dan status pekerjaan. Modal sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah (Nur et al., 2023). Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) karena banyaknya jumlah penduduk produktif dengan tingkat

produktivitas yang tinggi dapat mendorong pengembangan ekonomi di suatu negara dan mengurangi masalah kemiskinan.

TPAK di Provinsi Lampung sembilan tahun terakhir secara garis besar terus mengalami peningkatan meskipun terlihat berfluktuasi. Meskipun pada 2023 telah terjadi penurunan, TPAK Provinsi Lampung mengindikasikan peningkatan dari tahun-tahun yang lalu. Hal ini mengindikasikan suplai lapangan kerja yang meningkat meskipun belum sepenuhnya stabil (Bank Indonesia, 2021).

TPAK mempengaruhi kemiskinan karena jumlah penduduk yang besar akan membuat permasalahan baru dalam hal ketenagakerjaan. Semakin besar TPAK, menunjukkan semakin besar pula angkatan kerja dalam kelompok yang sama dan semuanya berada didalam golongan angkatan kerja yang produktif bekerja, maka hal itu dapat berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin.

Namun, meskipun TPAK Provinsi Lampung memiliki kecenderungan meningkat, begitupun juga dengan kemiskinan di Provinsi Lampung. Hal ini berkesinambungan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Alfionika et al. (2021) dan Mufidah (2021) yang menyatakan bahwa TPAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Semakin banyak angkatan kerja yang berada digolongan yang menganggur atau yang sedang berusaha mencari pekerjaan bisa menjadi penyebab TPAK tinggi namun penduduk miskin semakin banyak.

Peran pemerintah dalam mempengaruhi kemiskinan termasuk dalam mengantisipasi kegagalan pasar dalam perekonomian sangat penting. Menurut Mankiw (2003), Kebijakan fiskal terdiri dari dua instrumen utama yaitu kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan pengeluaran pemerintah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran pemerintah daerah dibagi menjadi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pengeluaran pemerintah daerah yang dipergunakan baik dalam urusan wajib dan urusan pilihan menunjukkan alokasi pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama untuk mencapai pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi alokasi anggaran keempat sektor tersebut paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Kesejahteraan masyarakat dilihat dari pemenuhan layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dianggap akan memiliki hubungan langsung dengan tingkat kemiskinan di dalam masyarakat.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi untuk dapat

menciptakan pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang produktif. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2021), tingkat pendidikan di Provinsi Lampung belum terdapat peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah masyarakat Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar 8,21 tahun dan pada tahun 2015 sebesar 7,56 tahun, berarti bahwa masyarakat usia 25 tahun ke atas rata-rata hanya mampu menikmati pendidikan sampai ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), masalah seperti ini rentan meningkatkan jumlah pekerja anak. Sejalan dengan teori Todaro & Smith (2011), bahwa ketika orang – orang berpendapatan rendah, baik dari keluarga sangat miskin atau bukan, umumnya tidak berdaya untuk menyediakan pendidikan bagi anggota keluarganya dengan baik, sehingga memiliki keterbatasan untuk memperoleh akses ke pendidikan.

Selain pendidikan, faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan dan menjadi pilar utama dalam memperkuat modal manusia selain pendidikan adalah kesehatan. Kesehatan adalah suatu investasi dalam meningkatkan dan juga memperbaiki produktivitas serta kualitas sumber daya manusia sekaligus untuk menjadikan taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Faktor kesehatan di Provinsi Lampung sembilan tahun terakhir meningkat cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh angka harapan hidup di Provinsi Lampung tahun 2023 adalah 71,25 tahun sedangkan tahun 2015 adalah 69,90 tahun. Namun Provinsi Lampung tetap menjadi salah satu provinsi penyumbang penduduk miskin terbanyak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Salsabilla & Muljaningsih (2022) serta Isroviyah (2022), bahwa kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan Chairunnisa & Qintharah (2022), menyatakan bahwa kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah dana desa, tingkat penagguran, pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengeluaran Pemerintah

1) Model Pembangunan Rostow dan Musgrave

Model ini menggambarkan hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Menurut Jaelani (2018), model pembangunan

Rostow dan Musgrave ini memberikan kerangka dasar bagi peningkatan pengeluaran pemerintah seiring dengan peranan pemerintah yang semakin besar. Meskipun dikembangkan berdasarkan riwayat pembangunan dari berbagai negara namun terdapat ketidakjelasan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara bertahap atau tahapan tersebut berlangsung simultan dan bersamaan.

2) Hukum Wagner Mengenai Perkembangan Aktivitas Pemerintah

Hukum Wagner memberikan asumsi bahwa ada hubungan positif antara pendapatan per kapita dengan pengeluaran pemerintah.

3) Teori Peacock & Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar. Teori ini juga dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, mereka mampu memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Fungsi APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Adanya fungsi tersebut mengharapkan bahwa kebijakan fiskal yang disampaikan dapat berjalan dengan tepat, efisien dan berkelanjutan.

Transfer

Kewenangan untuk mengelola dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan untuk mempercepat pembangunan daerah berdasarkan karakter dan kebutuhan masing – masing. Sesuai dengan konsep teori konsumsi yaitu tingkat kepuasan atas barang dan jasa meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Maka, belanja daerah terutama pada barang publik dan swasta dapat ditingkatkan bila ada perubahan positif dalam fiskal daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pengeluaran untuk menyediakan berbagai barang publik.

Keuangan Daerah

Menurut Kementerian Keuangan (2018), Keuangan Daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Otonomi daerah membawa suatu kesempatan yang besar bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan keuangan daerahnya dengan lebih baik (Mizkan et al., 2015). Pengelolaan keuangan daerah harus transparan, proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat.

Pendapatan Desa

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan diantaranya yaitu, pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya.

Terdapat berbagai bentuk prioritas pemerintah dalam alokasi anggaran, namun yang menjadi fokus utama dalam penelitian adalah salah satu bagian dari pendapatan transfer yaitu dana desa. Dana Desa mulai diberlakukan sejak 2015 oleh pemerintah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada Pemerintah Desa bertujuan agar pemerintahan desa dapat meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kemiskinan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004), mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan muncul dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya untuk meningkatkan kehidupan sosialnya. *Head Count Index* (HCI-P0) digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk menunjukkan persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan atau mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Sebenarnya metode perhitungan ini dinilai memiliki kelemahan karena belum mampu menggambarkan kondisi kemiskinan secara komprehensif (Ratih et al., 2023).

Menurut Sangadji et al. (2015) kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks mencakup sosial – ekonomi, yang memiliki karakteristik utama yaitu rendahnya dan terbatasnya

aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan baik pangan, sandang, papan maupun pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Kemiskinan memiliki definisi yang luas, dan bukan hal yang mudah untuk mengukur kemiskinan. Terdapat beberapa ukuran kemiskinan yang umumnya digunakan, diantaranya yaitu, kemiskinan kultural yang disebabkan oleh budaya daerah itu sendiri membuat masyarakatnya terus miskin, kemiskinan struktural terjadi karena struktur sosial yang membuat masyarakat tidak mendapat sumber pendapatan, kemiskinan absolut adalah ketika pendapatan yang diterima masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran mereka, dan kemiskinan relatif terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata.

Suatu wilayah yang terjebak pada kemiskinan, terlebih lagi memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan yang sangat tinggi akan mengakibatkan peristiwa buruk atau faktor lain akan muncul, inilah yang terjadi dalam lingkaran kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Menurut Apriyanti & Hendarto (2011), lingkaran setan kemiskinan ini disebabkan oleh keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terciptanya tingkat pembentukan modal. Sedangkan pembentukan modal diperoleh dari tingkat tabungan. Menurut Nurkse (1953), ada dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari sisi penawaran dan permintaan modal.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja. Yang dimaksud dengan penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berusia 15-64 tahun yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan dampak dari semakin besar jumlah angkatan kerja. Begitupun sebaliknya, semakin besar jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja (masih bersekolah dan mengurus rumah tangga) semakin kecil jumlah angkatan kerja, yang membuat persentase TPAK juga mengecil.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Seseorang yang memperoleh pendidikan akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dan bisa memperbaiki standar hidupnya. Pengeluaran di sektor pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Menurut Center for the Study of Living Standards (2001) dalam Toyamah et al. (2004) menyatakan bahwa pendidikan adalah elemen penting untuk memerangi kemiskinan, memberdayakan perempuan, serta menyelamatkan anak-anak dari upaya eksploitasi. Demikian juga pernyataan dari UNICEF yang mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi yang penting untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Oleh karena kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, memadai, terjangkau dan berkualitas (Budiharto, 2014).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif inferensial yaitu untuk menganalisis dan mengetahui tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung berdasarkan variabel dana desa, tingkat partisipasi angkatan kerja, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dan pengelaran pemerintah sektor kesehatan pada 13 kabupaten di Provinsi Lampung dengan menggunakan pengujian hipotesis dan analisis regresi sehingga dari hasil analisis tersebut dapat menarik kesimpulan atas penelitian ini.

Populasi dan Waktu Penelitian

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh pemerintah kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Jumlah pemerintahan kabupaten yang ada di Provinsi Lampung adalah sebanyak 15 pemerintahan yaitu Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung. Namun, penelitian ini hanya menggunakan 13 Kabupaten, dikarenakan Kota

Bandar Lampung dan Kota Metro tidak termasuk Kabupaten/Kota yang mendapatkan transfer dana desa.

Waktu penelitian ini adalah tahun 2015-2023.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan tingkat kemiskinan (KM) sebagai variabel dependen sedangkan untuk variabel independennya menggunakan data dana desa (DD), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), pendidikan yang ditunjukkan dengan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PDD), dan kesehatan yang ditunjukkan dengan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan(KS). Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari data *cross section* untuk 13 kabupaten di Provinsi Lampung dan data *time series* untuk tahun 2015-2023. Jumlah observasi secara keseluruhan adalah 65. Data dana desa dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan bersumber dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id), dan data kemiskinan serta tingkat partisipasi angkatan kerja bersumber dari *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (www.lampung.bps.go.id).

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda menggunakan regresi data panel, dengan menggunakan aplikasi olah data yaitu Eviews 10 sebagai alat analisis. Untuk mengetahui pengaruh antar variabel maka digunakan analisis statistik yaitu Analisis Regresi Data Panel, Uji Spesifikasi Model, Uji Asumsi Klasik, dan Uji Hipotesis.

Analisis Regresi Data Panel

Mengingat data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*, maka model regresi data panel dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \beta_1 X_{1it} + \varepsilon_{it} \quad n= 1,3,\dots,n ; t = 1 , 2,\dots,t$$

Dimana n adalah banyaknya variable bebas, i adalah jumlah unit observasi, t adalah banyaknya periode waktu, sehingga (n x t) menunjukkan banyaknya data panel yang akan di analisis.

Maka bentuk regresi data panel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DD_{1it} + \beta_2 TPAK_{2it} + \beta_3 P_{3it} + \beta_4 K_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Untuk mempermudah dalam proses interpretasi hasil regresi dan menghindari masalah asumsi klasik, penelitian ini akan mentransformasi model di atas menjadi model log-linier (double-log atau log-log).

Maka bentuk regresi data panel untuk penelitian ini dengan menggunakan model log-linier menjadi sebagai berikut :

$$KSM_{it} = \beta_0 + \text{Log}\beta_1 DD_{1it} + \beta_2 TPAK_{2it} + \text{Log}\beta_3 P_{3it} + \text{Log}\beta_4 K_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

KM_{it} : Kemiskinan (dalam persen)

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi

Log : Notasi Logaritma

DD_{1it} : Dana Desa (dalam ribuan rupiah)

$TPAK_{2it}$: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (dalam persen)

P_{3it} : Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (dalam rupiah)

K_{4it} : Pengeluaran Pemerintah Sektor kesehatan (dalam rupiah)

ε : *error term*

i : Unit *cross section* 13 Kabupaten di Provinsi Lampung

t : Unit *time series* tahun 2015-2023

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, antara lain: pendekatan *common effect*, pendekatan *fixed effects least square dummy variabel* (LSDV), dan pendekatan *random effect* (Widarjono, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

	LKM	DD	TPAK	KS	PDD
Mean	3.756440	1.62E+08	70.00026	1.67E+11	4.17E+11
Median	3.772981	1.37E+08	69.30000	1.54E+11	3.79E+11
Maximum	4.237066	3.18E+08	83.48000	4.00E+11	1.11E+12
Minimum	3.137037	59233667	59.72000	6.81E+09	3.18E+10
Std. Dev.	0.333896	73035872	4.444981	8.12E+10	2.46E+11
Skewness	-0.133339	0.565663	0.784681	0.622443	0.872517

Kurtosis	1.862317	2.083513	4.416617	3.140664	3.162499
Jarque-Bera	6.656521	10.33426	21.78978	7.651441	14.97381
Probability	0.035855	0.005701	0.000019	0.021803	0.000560
Sum	439.5034	1.90E+10	8190.030	1.95E+13	4.88E+13
Sum Sq. Dev.	12.93243	6.19E+17	2291.911	7.65E+23	7.01E+24
Observations	117	117	117	117	117

Kemiskinan (LKM)

Dapat diketahui bahwa nilai terkecil dari kemiskinan adalah 3.137037 persen di Kabupaten Mesuji pada tahun 2023. Kemudian Kemiskinan dengan nilai terbesar berada di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2016 yaitu sebesar 4.237066 persen. sedangkan nilai rata-rata kemiskinan 13 kabupaten di Lampung diperoleh nilai 3.756440 persen, dan nilai deviasinya, nilai yang mengukur seberapa jauh data dalam suatu kumpulan tersebar dari nilai rata-ratanya (mean), dalam data kemiskinan didapatkan nilai sebesar 0.333896 persen, itu artinya data kemiskinan 13 kabupaten di Lampung ini tidak terlalu berjauhan dari nilai rata-ratanya.

Dana Desa (DD)

Dapat diketahui bahwa nilai terkecil dari dana desa adalah 59233667 ribu rupiah di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2015. Kemudian dana desa dengan nilai terbesar berada di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022 yaitu sebesar 3.18E+08 ribu rupiah atau 318359441 ribu rupiah. sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh 1.62E+08 ribu rupiah dan nilai deviasinya sebesar 73035872 ribu rupiah, jika melihat data ini perbandingan antara jumlah Dana Desa paling besar dan rata-rata jumlah Dana Desa antar kabupatennya terdapat jarak yang lumayan jauh.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Dapat diketahui bahwa nilai terkecil dari TPAK adalah 59.7200 persen di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020. Kemudian TPAK dengan nilai terbesar berada di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2020 yaitu sebesar 83.48000 persen. Nilai rata-rata yang diperoleh 70.00026 persen dan nilai deviasinya sebesar 4.444981 persen, dari data ini dapat disimpulkan bahwa ada disatu waktu persebaran penduduk usia produktif yang memiliki pekerjaan masih

belum merata antar di beberapa kabupaten dapat terlihat dari jumlah minimum dan maksimum, terdapat jarak yang lumayan besar, meskipun rata-rata jumlah TPAK antar kabupaten terlihat cenderung stabil.

Pendidikan (PDD)

Dapat diketahui bahwa nilai terkecil dari Pendidikan adalah $3.18E+10$ rupiah di Kabupaten Wai Kanan pada tahun 2015. Kemudian Pendidikan dengan nilai terbesar berada di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2016 yaitu sebesar $1.11E+12$ rupiah. sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh $4.17E+11$ rupiah dan nilai deviasinya sebesar $2.46E+11$.

Kesehatan (KS)

Dapat diketahui bahwa nilai terkecil dari Kesehatan adalah $6.81E+09$ rupiah di Kabupaten Wai Kanan pada tahun 2015. Kemudian Kesehatan dengan nilai terbesar berada di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2023 yaitu sebesar $4.00E+11$ rupiah. sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh $1.67E+11$ rupiah dan nilai deviasinya sebesar $8.12E+10$.

Hasil Regresi Model Data Panel

Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	751.837876	(12,100)	0.0000
Cross-section Chi-square	528.053777	12	0.0000

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan dengan menggunakan uji chow, diketahui bahwa *cross-section* F lebih kecil dari α 5 persen ($0.0000 < 0.05$). Sehingga H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya model *Fixced Effect* lebih tepat untuk digunakan.

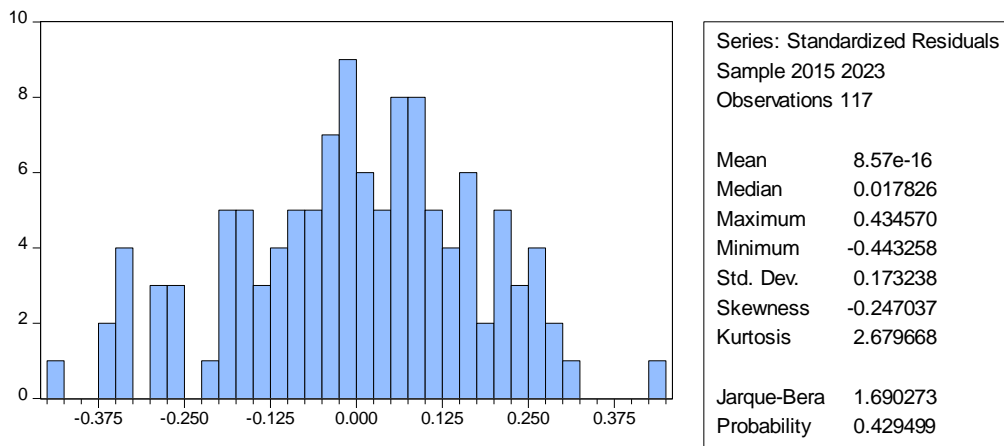
Uji Hausman

Uji hausman merupakan pengujian yang dilakukan untk mengetahui yang terbaik diantara model *Fixced Effect* dan *Random Effect*.

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	75.774224	4	0.0000

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan dengan menggunakan uji chow, diketahui bahwa *cross-section* F lebih kecil dari α 5 persen ($0.0000 < 0.05$). Sehingga H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya model *Fixed Effect* lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian Asumsi Kalsik



Sumber : *Eviews*, 2023

Berdasarkan hasil pengujian uji normalitas yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai *P value* Jarque-Bera sebesar 0,429499 dimana lebih besar dari 0,05 (α -5 persen). Atas dasar pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam model penelitian ini data terdistribusi secara normal.

Uji Heteroskedastistas

Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.582507	0.208527	2.793430	0.0063
DD	-2.88E-10	3.83E-10	-0.753578	0.4529
TPAK	-0.004781	0.002986	-1.600797	0.1126
KS	-9.33E-14	2.77E-13	-0.337121	0.7367
PDD	-1.13E-13	1.02E-13	-1.104718	0.2719

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai probabilitas masing-masing variabel lebih besar dari derajat kepercayaan 0,05 ($\alpha = 5$ persen). Dimana nilai probabilitas variabel DD sebesar $0,4529 > 0,05$, variabel

TPAK sebesar $0,1126 > 0,05$, variabel PDD sebesar $0,2719 > 0,05$, dan variabel KS sebesar $0,7367 > 0,05$. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan menolak H_a , yang artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model.

Uji Multikolinearitas

	DD	TPAK	KS	PDD
DD	1.000000	-0.107374	0.651073	0.653448
TPAK	-0.107374	1.000000	-0.005462	-0.038672
KS	0.651073	-0.005462	1.000000	0.722574
PDD	0.653448	-0.038672	0.722574	1.000000

Berdasarkan hasil estimasi uji multikolinearitas yang telah dilakukan, diketahui bahwa koefisien antar variabel lebih kecil dari 0,8 (80 persen) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi koefisien korelasi antar variabel dalam model.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel pengambilan keputusan uji autokorelasi diketahui bahwa nilai Durbin Watson pada hasil regresi adalah 2.1428, nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam variabel tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.

Hasil Estimasi Regresi Model Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.950032	0.266396	14.82770	0.0000
DD	-2.62E-09	3.18E-10	-8.238698	0.0000
TPAK	-0.011362	0.003718	-3.056141	0.0028
KS	-2.21E-13	3.11E-13	-0.710937	0.4786
PDD	-5.12E-13	1.03E-13	-4.978791	0.0000
R-squared	0.730806			
F-statistik	76.01435			

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan fixed effect, maka didapatkan hasil dalam model adalah sebagai berikut:

$$KSM_{it} = 3.950032 - 2.62E-09 \beta_1 DD_{1it} - 0.011362 \beta_2 TPAK_{2it} - 2.21E-13 \beta_3 P_{3it} - 5.12E-13 \beta_4 K_{4i}$$

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Dengan menggunakan alpha 5 persen (0.05) dan degree of freedom (n-k). dimana n merupakan jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel yang digunakan ($117-5=112$) maka nilai t-tabel adalah 1.65857.

Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai t-statistik > t-tabel artinya H_0 ditolak dan menerima H_a , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 13 kabupaten Provinsi Lampung.

Berdasarkan perhitungan nilai t-statistik > t-tabel artinya H_0 ditolak dan menerima H_a , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 13 kabupaten Provinsi Lampung.

Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai t-statistik > t-tabel artinya H_0 ditolak dan menerima H_a , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 13 kabupaten Provinsi Lampung.

Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai t-statistik < t-tabel artinya H_a ditolak dan menerima H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di 13 kabupaten Provinsi Lampung.

Uji Signifikan Simultan (Uji F-Statistik)

Penelitian ini menggunakan alpha 0,05 dan degree of freedom atau DF, (k-1)- (5-1=4) dan DF: (n-k)-(117-5=112), sehingga berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai F-tabel sebesar 2.45. Nilai F-statistik 76.01435 > F-tabel 2.45 artinya menolak H_0 dan menerima H_a , sehingga dapat diartikan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan kata lain variabel dana desa, tingkat partisipasi angkatan kerja, pendidikan, dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan di 13 kabupaten Provinsi Lampung.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan model *fixed effect* diketahui bahwa nilai R-squared (R^2) yaitu sebesar 0.730806. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen yaitu kemiskinan secara simultan dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu

dana desa, tingkat partisipasi angkatan kerja, pendidikan, dan kesehatan sebesar 73.08 persen, sedangkan sisanya 26.92 persen dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

KESIMPULAN

Dana Desa, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang ditunjukkan oleh variabel pendidikan, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di 13 kabupaten Provinsi Lampung tahun 2015-2023. Artinya, jika terjadi peningkatan terhadap alokasi dana desa, TPAK, pengeluaran sektor pendidikan, maka akan menurunkan kemiskinan di 13 kabupaten Provinsi Lampung tahun 2015-2023 begitu juga sebaliknya. Sedangkan variabel Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yang ditunjukkan oleh variabel kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di 13 kabupaten Provinsi Lampung tahun 2015-2023. Artinya, jika terjadi peningkatan atau penurunan terhadap kesehatan maka tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di 13 kabupaten Provinsi Lampung tahun 2015-2023.

Dana desa, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pendidikan, dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di 13 kabupaten Provinsi Lampung tahun 2015-2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfionika, R., Yulmardi, & Hardiani. (2021). Analisis determinasi tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jambi. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 10(1), 47–58. <https://doi.org/10.22437/jels.v10i1.12456>
- Apriyanti, L., & Hendarto, M. (2011). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPB Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008 - 2010). *Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro*.
- Ayu, I. N., & Husaini, M. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada sepuluh kabupaten/kota di Propinsi Lampung 2006-2010. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 1–15.
- Budiharto, W. (2014). *Teori dan Implementasi* (revisi). Penerbit Andi.
- Chairunnisa, N. M., & Qintharah, Y. N. (2022). Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 147–161. <https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.530>
- Emalia, Z. (2013). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(1), 46–54.
- Ikhsan, M., & Shidiq, A. R. (1999). Tinjauan Triwulanan Perekonomian Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*.
- Isroviyah, N. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/8146>
- Jaelani, A. (2018). Public Expenditure Management in Indonesia: Islamic Economic Review

